

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Era reformasi diawali dengan terjadinya krisis moneter pada tahun 1998. Sejak saat itu, pemerintah Indonesia terus memperbaiki birokrasi dalam pemerintahan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperbaharui pengelolaan keuangan negara. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun (2003) menjadi salah satu dampak akan ditetapkannya paket UU Keuangan Negara yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan negara. UU Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, dan efektif. Agar hal tersebut dapat dicapai, diperkenalkan konsep baru yaitu penganggaran berbasis kinerja. Konsep tersebut mengubah sistem pengelolaan keuangan negara yang awalnya berorientasi pada masukan (*input*) menjadi pada hasil (*output/outcome*). Dengan adanya konsep baru ini, maka dilakukan perubahan dalam sistem penganggaran di Indonesia.

Penganggaran berbasis kinerja merupakan konsep penganggaran yang mengedepankan *output* tetapi tetap memastikan bahwa dana yang dikeluarkan itu

efektif dan tepat sasaran. Sejalan dengan pendapat Sulistio (2010) yang menyampaikan bahwa sistem penganggaran berbasis kinerja merupakan sistem yang mengaitkan antara *output* dan *outcome* dengan tetap menjaga efektivitas dan efisiensi anggaran yang dialokasikan. Oleh karena itu, maka dokumen perencanaan dan pelaksanaan harus sejalan agar tidak terjadi tumpang tindih antara pendanaan dan kinerja yang akan dilakukan. Agar masalah tersebut tidak terjadi, maka pemerintah perlu menyediakan informasi kinerja. Informasi kinerja dibuat berdasarkan konsep *Logic Model* (Suliantoro, Penyusunan Informasi Kinerja, 2019). Konsep ini merupakan model yang menggambarkan hubungan logis antar *input*, proses, *output*, dan *outcome*. Oleh karena itu, informasi kinerja dapat dituangkan pada dokumen pelaksanaan anggaran sebagai dasar kinerja dan pelaksanaan kegiatan.

Informasi kinerja merupakan informasi yang menunjukkan rencana kinerja dari suatu kementerian/lembaga yang memuat *input* yang dipakai sampai dengan *outcome* yang ingin dicapai. Dalam penerapannya, diperlukan adanya indikator kinerja sebagai alat ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja yaitu *Balance Scorecard* (BSC) (Suliantoro, 2021). BCS merupakan suatu alat manajemen yang bisa menerjemahkan visi, misi, tujuan dan strategi sesuatu unit organisasi ke dalam kerangka operasional. Konsep BCS pertama kali dipakai di Kementerian Keuangan. BSC sendiri digunakan sebagai sistem pengukuran, pengelolaan, dan manajemen kinerja pada suatu unit organisasi pemerintahan. Pada akhir tahun anggaran, BSC akan menjadi dasar pelaporan kinerja dalam laporan kinerja tiap unit organisasi pemerintahan.

Selain informasi kinerja, hasil dari penerapan penganggaran berbasis kinerja ini adalah tersedianya laporan kinerja (LAKIN). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 (2014) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 (2014), LAKIN dibuat sebagai gambaran tercapainya program dan kegiatan sebagai pengendalian penyerapan anggaran. LAKIN merupakan acuan bentuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dan program dalam konsep perencanaan sehingga informasi kinerja dalam laporan kinerja juga harus sejalan dengan yang tertuang dalam dokumen perencanaan. Penerapan BSC pada unit organisasi pemerintah berdampak akan adanya keterbukaan informasi kinerja pada LAKIN dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Keterbukaan informasi kinerja tersebut mencakup banyak hal, terutama pada bagian hasil (*output*).

Berdasarkan hal tersebut, penulis akan melakukan analisis kesesuaian informasi kinerja pada dokumen perencanaan anggaran satuan kerja yaitu DIPA dan LAKIN karena seharusnya terdapat kesamaan antara informasi kinerja pada LAKIN dengan informasi kinerja pada DIPA. Namun ternyata ada perbedaan dalam format dan fungsi dari kedua dokumen tersebut. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian atas kesesuaian informasi kinerja antara kedua dokumen tersebut. Penelitian akan dilakukan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Investasi yang merupakan instansi vertikal dari Kementerian Keuangan. Hasil analisis tersebut dituangkan ke dalam Karya Tulis Tugas Akhir berjudul “Analisis Perbandingan Kesesuaian Informasi Kinerja pada DIPA dan LAKIN di KPPN Khusus Investasi Tahun 2019 - 2021”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dilakukan perumusan masalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Bagaimana kesesuaian informasi kinerja pada DIPA dan LAKIN di KPPN Khusus Investasi Tahun 2019 - 2021? dan;
- 1.3.2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan ketidaksesuaian informasi kinerja pada DIPA dan LAKIN di KPPN Khusus Investasi Tahun 2019 - 2021?

## **1.3. Tujuan Penulisan**

Berikut tujuan penulisan karya tulis ini adalah:

- 1.3.1. Menganalisis kesesuaian informasi kinerja pada DIPA dengan LAKIN KPPN Khusus Investasi Tahun 2019 - 2021, dan;
- 1.3.2. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian informasi kinerja pada DIPA dan LAKIN di KPPN Khusus Investasi Tahun 2019 - 2021.

## **1.4. Ruang Lingkup Penulisan**

Ruang lingkup pada karya tulis ini berfokus pada analisis kesesuaian informasi kinerja berupa nomenklatur *output*, indikator kinerja, serta target pada DIPA dan laporan kinerja KPPN Khusus Investasi. Pengambilan data dilakukan di KPPN Khusus Investasi di kota Jakarta sebagai lokasi pengambilan data dan objek penulisan karya tulis ini bertepatan dengan lokasi Praktik Kerja Lapangan penulis. Periode tahun 2019 – 2021 diambil sebagai keadaan yang terbaru. Tahun 2022 tidak termasuk, karena belum adanya LAKIN untuk tahun anggaran tersebut.

## **1.5. Manfaat Penulisan**

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bentuk kebermanfaatannya tersebut adalah sebagai berikut:

### **1.3.1. Bagi Penulis**

Karya tulis ini disusun dengan harapan dapat menambah pengetahuan mengenai penulisan karya tulis yang baik dan benar, menambah wawasan serta pengetahuan baru khususnya di bidang penganggaran berbasis kinerja dan pengelolaan informasi kinerja. Selain itu, karya tulis ini juga bermanfaat sebagai syarat kelulusan penulis dari program studi Diploma III Kebendaharaan Negara.

### **1.3.2. Bagi KPPN Khusus Investasi**

Karya tulis ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi bagian perencanaan serta pertanggungjawaban satuan kerja agar penyajian informasi kinerja dalam DIPA dan LAKIN lebih baik. Melalui tulisan ini juga diharapkan tujuan dari penganggaran berbasis kinerja bisa tercapai yaitu adanya keselarasan antara pendanaan dan prestasi kinerja, adanya transparansi dan efektifitas penganggaran, serta tercapainya fleksibilitas dan akuntabilitas dalam mengelola dan melaksanakan tugas.

### **1.3.3. Bagi Pembaca**

Diharapkan karya tulis ini mampu menjadi wawasan baru mengenai penganggaran berbasis kinerja dan dapat menjadi referensi bagi pembaca yang hendak melakukan penelitian dan membutuhkan informasi mengenai pengembangan

teori mengenai kesesuaian informasi kinerja pada DIPA dan LAKIN serta faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penerapannya.

## **1.6. Metode Pengumpulan Data**

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini terdapat beberapa metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis. Penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### **1.3.1. Studi Kepustakaan**

Metode pengumpulan data dilakukan dengan membaca dan mempelajari data, laporan, serta literatur-literatur seperti materi perkuliahan, undang-undang, Peraturan Menteri Keuangan, jurnal penelitian, artikel, berita *offline* maupun *online*, serta sumber-sumber lain yang mendukung jalannya penelitian serta memberikan gambaran teoritis untuk penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir.

Studi kepustakaan digunakan untuk mengurangi risiko terjadinya duplikasi data terhadap penelitian sebelumnya dan membangun kerangka teoritis penelitian.

### **1.3.2. Studi Lapangan**

Studi lapangan merupakan metode untuk mengumpulkan data dengan cara terjun langsung ke lapangan sesuai dengan objek penelitian. Metode yang dilakukan adalah Observasi. Menurut Neil Cowie (2009), observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sadar dan pemeriksaan rinci dari perilaku peserta secara natural. Observasi dilakukan dengan cara mengamati lingkungan serta data-data

secara akurat dengan tujuan mendapatkan informasi yang memadai tentang kegiatan yang sedang berlangsung sebagai objek kajian dalam penelitian.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi gambaran Karya Tulis Tugas Akhir secara umum, meliputi latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan topik pembahasan Karya Tulis Tugas Akhir ini, meliputi teori mengenai konsep penganggaran berbasis kinerja, konsep dasar DIPA, konsep dasar LAKIN, dan informasi kinerja.

#### **BAB III METODE DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang dilakukan, gambaran umum KPPN Khusus Investasi, serta pembahasan tentang kesesuaian informasi kinerja DIPA dan LAKIN dan faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian informasi kinerja pada DIPA dan LAKIN.

#### **BAB IV SIMPULAN**

Bab ini merupakan bagian akhir dari Karya Tulis Tugas Akhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya dan merupakan jawaban atas pertanyaan pada bagian rumusan masalah, serta berisi saran yang diharapkan dapat meningkatkan kesesuaian informasi kinerja pada DIPA dan LAKIN.